

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian (Sukirno 2004:27). Banyak orang memandang bahwa inflasi selalu membawa dampak negatif terhadap perekonomian. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat inflasi ringan. Dengan tingkat inflasi ringan antara 4-8% membuat iklim ekonomi di Indonesia cukup kondusif. Dengan adanya inflasi ringan tersebut memacu para pengusaha untuk terus mengembangkan usahanya karena pengusaha dapat mendapatkan keuntungan lebih akibat dari inflasi ringan tersebut. Dengan begitu para pengusaha akan membuka lapangan pekerjaan dan terbukanya lapangan pekerjaan baru akan memicu pertumbuhan ekonomi karena peningkatan kapasitas produksi.

Menurut Mankiw (2003) dalam Silvia ED (2013:2) dalam analisis makro pengukuran dalam perekonomian suatu negara adalah Produk Domestik Bruto (PDB). PDB mengukur aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB yang digunakan adalah PDB berdasarkan harga konstan (PDB riil) sehingga angka pertumbuhan yang dihasilkan merupakan pertumbuhan riil yang terjadi karena adanya tambahan produksi. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah

sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat (Sukirno,1994). Menurut Boediono, pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Lincolin (1997), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak.

Pembangunan di segala bidang harus terus dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri karena dibutuhkan biaya yang sangat besar. Peran serta masyarakat sangat diharapkan oleh pemerintah salah satunya adalah dengan membayar pajak (Manik 2012). Oleh karena itu pajak merupakan suatu elemen yang sangat penting di dalam penerimaan negara karena pajak adalah salah satu tiang utama dalam pendapatan negara yang perlu di tingkatkan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem otonomi daerah dimana pemerintah pusat memberikan wewenang pada pemerintah daerah untuk menjalankan rumah tangganya sendiri, hal ini sering disebut juga sebagai desentralisasi. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah yang mengalami beberapa perubahan dalam isinya. Semenjak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali potensi-potensi sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah dan membiayai belanja daerah.

Dengan begitu daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Oleh karena itu setiap daerah otonom dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk membiayai urusan

rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh karena itu dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Semakin tinggi peranan PAD merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah Terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi Terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah.

Safitri Wulansari (2010) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan” menyimpulkan bahwa besarnya pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap penerimaan pajak hiburan di kota Bandung adalah 0.673. Hal tersebut berarti penerimaan pajak hiburan kota Bandung 67.3% nya ditentukan oleh kedua variabel yang digunakan, sedangkan sisanya yaitu 32.7% dipengaruhi oleh variabel lain, Pada tingkat signifikansi 5%, secara simultan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hiburan. Pengujian secara parsial dengan tingkat signifikansi 5%, pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak hiburan, sedangkan tingkat inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penerimaan pajak hiburan di kota Bandung.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya penulis mengganti variabel pajak hiburan menjadi pajak restoran karena didalam penelitian Ni Nyoman Suartini (2011) yang berjudul “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar” menyatakan bahwa di antara ketiga variabel yaitu jumlah kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel dan Restoran yang paling dominan berpengaruh terhadap PAD adalah pajak Hotel dan Restoran (PHR). Seiring dengan berkembangnya Kota Bandung, maka daya tarik Kota Bandung adalah sebagai salah satu kota wisata kuliner yang cukup terkenal, Oleh karena itu penulis tertarik menggunakan pajak restoran sebagai variabel pengganti pajak hiburan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dengan judul **“Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Restoran Kota Bandung.”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi permasalahan penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak restoran?
2. Apakah tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap penerimaan pajak restoran?

3. Seberapa besar pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap penerimaan pajak restoran?
4. Seberapa Besar pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap penerimaan pajak restoran?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui apakah tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak restoran.
2. Untuk mengetahui apakah tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap penerimaan pajak restoran.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap penerimaan pajak restoran.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap penerimaan pajak restoran.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka diharapkan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pajak restoran, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak restoran.

2. Akademisi

Membantu pembaca agar penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pajak-pajak daerah baik secara teori maupun praktik.

3. Peneliti Selanjutnya

- Membantu peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut.
- Sebagai petunjuk untuk peneliti selanjutnya dalam menjalankan penelitiannya.